

**PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PROMOSI
DALAM MENUNJANG EFEKTIVITAS STRATEGI PROMOSI DAERAH
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Winda Altra Sarjana
W_altra83@yahoo.com

Indra Prasetyo
Sri Mulyani
Universitas Wijaya Putra Surabaya

ABSTRACT

This study is to analyze how the management of promotional facilities and infrastructure in supporting the effectiveness of regional promotion strategies in Indragiri Hilir Regency. The background of this research is to find out a more in-depth study to analyze the increase in investment realization through the promotion of strategies carried out by the Indragiri Hilir Regency Government, by carrying out the management of promotional facilities and infrastructure to attract investors to invest in Indragiri Hilir Regency, whose ultimate goal is so that the economic growth and welfare of local communities can compete with other regions, taking into account the support for the management of promotional facilities and infrastructure in supporting the effectiveness of regional promotion strategies in Indragiri Hilir Regency. The research was conducted using qualitative research, which aims to gain a general understanding of social reality from the perspective of the participants who are the focus of the research. The results showed that the management of facilities and promotion of infrastructure supporting the effectiveness of regional promotion strategies in Indragiri Hilir Regency was not effective in terms of management functions, namely planning, organizing, implementing and controlling.

Keywords: *facilities and infrastructure promotion, planning, implementation, control*

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Hal yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah mengetahui kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis peningkatan realisasi investasi melalui strategi promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana promosi untuk menarik minat investor menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir, yang tujuan akhirnya adalah agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah mampu bersaing dengan daerah lainnya, dengan mempertimbangkan hambatan pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan yang menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan sarana dan prasarana promosi menunjang efektivitas strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir tidak efektif ditinjau dari fungsi manajemen, yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.

Kata kunci: sarana dan prasarana promosi, perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengendalian

PENDAHULUAN

Saat ini, hanya ada lima perusahaan yang mampu mengelola sebagian hasil perkebunan rakyat, selain pengolahan daging kelapa, juga tersedia sabut, tempurung (batok), air dan batang kelapa. Kelima perusahaan tersebut adalah PT. Pulau Sambu Guntung, PT. Pulau Sambu Kuala Enok, PT. Inhil Sarimas Kelapa, PT. Kokonako dan PT. RSUP. Selain kelapa, sagu dan pinang juga menjadi peluang strategis lainnya untuk dikembangkan. Sagu dan pinang yang dimiliki masyarakat, dijadikan tepung dan beberapa produk pangan yang diolah oleh masyarakat secara manual. Dimana untuk pinang, memiliki harga sangat luar biasa, tapi sayangnya sampai saat ini belum tersentuh oleh perusahaan industri, oleh karena perlu adanya lahan yang tersedia untuk kawasan industri agar beberapa sektor dapat lebih mudah terintegrasi, dan tentunya juga akan menjadi peluang ketertarikan pihak investor lainnya.

Mengacu pada hal tersebut, salah satu strategi inventasi yang dapat dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan peluang inventasi daerah dengan melakukan strategi promosi untuk menarik investasi, orang dan industri ke suatu daerah adalah meningkatkan daya dukung sarana dan prasarana promosi daerah. Hal tersebut termuat dalam pelimpahan kewenangan tugas Bupati kepada Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir No. 47

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Tugas Pokok Bidang Promosi Penanaman Modal lingkup Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal, serta Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Selanjutnya, strategi promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan peluang investasi dilakukan melalui Kegiatan Promosi Penanaman Modal yang telah dilakukan oleh Kabupaten Indragiri Hilir semenjak tahun 2010. Kegiatan promosi ini terdiri dari beberapa jenis kegiatan, yaitu Pameran/Expo/Bazaar, Pencetakan dan Penyebaran Booklet Promosi Daerah, Banner dan Spanduk, Temu Bisnis, Seminar, Fieldtrip ke Lokasi Industri dan Festival yang bertujuan untuk mengenalkan potensi unggulan daerah seperti perkelapaan, menarik minat investor, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan, kepada para calon investor.

Hasil nyata yang dapat dilihat dari pelaksanaan tugas Bidang Promosi Penanaman Modal melalui kegiatan promosi tersebut diatas, belum dapat menunjukkan kenaikan investasi yang signifikan. Hal ini dilihat dari Nilai Investasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, seperti tabel berikut :

Tabel 1

Perkembangan Investasi Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 s/d 2017

No	Tahun	Realisasi (Rp)	%
1	2013	4.628.859.728.037,-	8
2	2014	7.378.415.712.853,-	13
3	2015	13.839.285.045.424,-	24
4	2016	14.361.928.172.343,-	25
5	2017	16.592.912.932.130,-	29

Sumber Data: DPMPTSP Kab. Indragiri Hilir

Dengan melihat data dari tabel 1, dapat digambarkan nilai inventasi dalam 5 (lima) tahun, yakni tahun 2013 sebesar Rp. 4.628.859.728.037 atau sebesar 8%, tahun 2014 sebesar Rp. 7.378.415.712.853 mengalami kenaikan sebesar 5%, tahun 2015 sebesar Rp. 13.839.285.045.424 mengalami kenaikan sebesar 11%, tahun 2016 sebesar Rp. 14.361.928.172.343 mengalami kenaikan sebesar 1% dan tahun 2017 sebesar Rp. 16.592.912.932.130 mengalami kenaikan sebesar 4%. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa kenaikan investasi yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2015, yakni sebesar 11%.

Cukup tingginya investasi tahun 2015 tersebut diperoleh dari investor bermodalkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yakni kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri, dengan menggunakan modal dalam negeri, yang sebagian besar berstatus perusahaan konstruksi. Selanjutnya, penelitian ini ingin melihat permasalahan penanaman modal dan promosi sebagai bagian dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Indragiri Hilir, sebagaimana pelimpahan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah, dalam peningkatan kapasitas ekonomi daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagai tujuan dari pelaksanaan pembangunan di daerah. Investasi (penanaman modal) dan promosi merupakan bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi, baik dalam skala lokal maupun nasional.

Hal lain yang patut untuk diperhatikan bagi pemerintah daerah adalah bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh investor atau pengusaha pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang melibatkan pihak swasta, baik yang berasal dari penanaman modal asing maupun modal dalam negeri, mempunyai peranan penting dalam kegiatan perekonomian, karena

bagaimanapun juga pertumbuhan ekonomi terkait erat dengan tingkat penanaman modal, maka untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi diperlukan pula tingkat penanaman modal yang tinggi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sentosa Sembiring (2010:170) yang mengungkapkan bahwa sebelum memutuskan menanamkan modalnya, investor biasanya terlebih dahulu melakukan studi kelayakan (*feasibility study*) tentang prospek bisnis yang akan dia jalankan, termasuk hal yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan investasi yang akan ia jalankan. Hal yang menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak adanya perlindungan hukum yang jelas, baik terhadap modal yang ia tanamkan, maupun terhadap barang yang akan diproduksi.

Upaya kegiatan penanaman modal di daerah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan diperlukan dalam rangka menunjang percepatan peningkatan pembangunan ekonomi, mengingat kegiatan penanaman modal merupakan akselerator peningkatan lapangan kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan masyarakat menuju ekonomi bangsa yang mandiri.

Oleh karenanya, perlu kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis peluang investasi melalui strategi promosi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana promosi daerah dalam rangka menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan tujuan agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah mampu bersaing dengan daerah lainnya. Hal tersebut dilakukan melalui peningkatan materi promosi dengan mempertimbangkan kelemahan atau hambatan investor, untuk menyakinkan dirinya tertarik dalam menanamkan modalnya pada daerah.

TINJAUAN TEORIETIS

Menurut George R. Terry (Sukarna, 2011), *management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. Menurut Hasibuan (2009:35), mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2009:2), mengemukakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pendayagunaan sumber daya lainnya secara efisien, efektif dan produktif merupakan hal yang paling penting untuk mencapai suatu tujuan. Adapun menurut Stephen P. Robbins, Mary Coulter (2012:8), mengemukakan bahwa manajemen melibatkan koordinasi dan mengawasi aktivitas kerja lainnya, sehingga kegiatan selesai dengan efektif dan efisien.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:880), sarana diartikan segala kesatuan yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan alat/media, dimana menurut istilah adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya sesuatu proses (usaha, pembangunan, proyek dan sebagainya). Moenir (1995:119) mengemukakan bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan, baik alat tersebut adalah merupakan peralatan pembantu maupun peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Lodico, Spaulding,

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan. sarana dan prasarana promosi dalam penelitian ini dimaksudkan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu kegiatan dalam menjangkau pendapat atau respon atas produk atau jasa yang ditawarkan.

Pengertian efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Mahmudi (2005:92), efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dimana menurut Pasolong (2007:4), efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan. Dari pengertian efektivitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah pokok utama yang menyatakan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan dan mencapai target-targetnya yang ditentukan sebelumnya. Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut, karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini, dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

dan Voegtler (Emzir (2011:2) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti

sosiologi dan antropologi yang diadaptasi ke dalam setting pendidikan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan pada pemberian suara pada perasaan dan persepsi dari partisipan pada penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan.

Sugiyono (2012:32) menyatakan bahwa fokus penelitian kualitatif bersifat holistic (menyeluruh, tidak dapat dipisahkan), sehingga penelitian kualitatif menetapkan penelitiannya berdasarkan keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi aspek tempat, pelaku dan aktivitas yang berintegrasi secara sinergis. Fokus penelitian yang akan dianalisis adalah pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektifitas strategi promosi serta apa saja hambatanannya.

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Propinsi Riau, dengan lokus penelitian terkait dengan Bidang Tugas Promosi Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, yang beralamat di Jalan Hang Tuah Nomor 4 Tembilahan.

Dengan demikian, untuk kebutuhan penelitian ini maka informan dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Bidang Promosi Penanaman Modal, Kasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Kasi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal dan Kasubbid Perekonomian Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui wawancara yang merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Penelitian lapangan dilakukan dengan wawancara langsung berupa wawancara yang mendalam

(*indepth interview*), disertai dengan pedoman wawancara yang semi terstruktur. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan narasumber, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses pengumpulan data menurut Miles dan Humberman (Emzir, 2011), dengan tahapan analisis data sebagai berikut: (a) Pengumpulan data. (b) Reduksi data (c) Penarikan kesimpulan (d) Keikutsertaan peneliti sebagai *instrument* (e) Ketekunan pengamatan (e) Trianggulasi (f) Kecukupan referensial .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Promosi dalam Menunjang Efektivitas Strategi Promosi Daerah berdasarkan Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya, merencanakan berarti mengupayakan menggunakan sumber daya manusia (*human resources*), sumber daya alam (*natural sources*) dan sumber daya lainnya (*other sources*) untuk mencapai tujuan yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai fungsi manajerial karena perencanaan merupakan langkah kongkret yang pertama-tama diambil dalam usaha pencapaian tujuan. Dimana perencanaan merupakan usaha nyata langkah-langkah yang harus ditempuh yang dasar-dasarnya telah diletakkan dalam strategis organisasi. Selain itu maksud dibuat perencanaan adalah melihat program-program yang dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan hasil penelitian menunjukkan

bahwa fungsi perencanaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir diawali dengan membuat perencanaan kegiatan sesuai dengan input, output sasaran dan indikator kegiatan yang bertujuan untuk melaksanakan promosi daerah dalam rangka menyampaikan potensi dan peluang investasi melalui kegiatan penyelenggaraan pameran investasi yang memuat kegiatan lainnya seperti forum diskusi, konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait, *talk show*, seminar, *business to business* dan lainnya sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan atau ditetapkan. Perencanaan pelaksanaan promosi daerah yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui organisasi Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir hanya kegiatan penyelenggaraan pameran investasi sesuai dengan pagu anggaran yang disetujui atau ditetapkan.

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. Perencanaan merupakan aspek penting dari manajemen. Keperluan merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa setiap orang dapat mengubah masa depan menurut kehendaknya. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah kemampuan untuk secara sadar memilih alternative masa depan yang dikehendaknya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa. Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan terealisasikan dengan baik.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Adisasmitha (2011:22) yang menyatakan perencanaan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sistematis disini,

dimaksudkan agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjadi tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai.

Oleh karenanya untuk menyusun perencanaan yang baik maka indikator perencanaan memuat :

- a. Rencana harus memiliki tujuan yang khas. Dimana rencana kegiatan diarahkan untuk mencapai hasil perencanaan sesuai dengan tujuan. Tujuan harus jelas dan mudah dipahami oleh semua orang yang akan melaksanakan rencana itu.
- b. Terdapat kegiatan yang diprioritaskan yang disebut sebagai kegiatan kunci. Tanpa kegiatan kunci tidak ada jaminan bahwa pelaksanaan rencana akan berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Keterlibatan semua sumber daya organisasi. Dalam hal ini keterlibatan ini akan menimbulkan rasa bertanggung jawab dalam tahap pelaksanaan rencana nantinya. Dengan cara ini pelaksanaan rencana diharapkan dapat berjalan sesuai yang diharapkan.
- d. Perencanaan hendaknya telah diperhitungkan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya, seperti pengorganisasian, pengarahan, koordinasi dan pengendalian. Hal ini penting sebab perencanaan memang merupakan fungsi yang mendahului kegiatan manajemen lainnya, sehingga rencana akan selalu memiliki sifat sebagai acuan dari fungsi manajemen lainnya.
- e. Perencanaan selalu diperbaiki untuk mengatasi perubahan dan perkembangan organisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan fungsi manajemen lainnya yakni

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian

- f. Adanya penanggung jawab perencanaan. Penanggung jawab perencanaan biasanya sudah ditetapkan dengan garis hirarkis dalam struktur organisasi sehingga kewenangan dalam hasil perencanaan dapat dipertanggung jawabkan
- g. Perencanaan bersifat tentatif dan bersifat interim. Rencana tidak ada yang bersifat final, sebab rencana yang baik harus memiliki keluwesan terhadap perubahan-perubahan yang ada.

Selanjutnya dapat disampaikan cara dalam mengatasi hambatan dalam penetapan tujuan dan perencanaan antara lain:

- a. Pemahaman maksud tujuan dan rencana
Salah satu cara terbaik untuk penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan mengetahui bahwa terdapat keterbatasan pada efektivitas penetapan tujuan dan pembuatan rencana yang memberikan pengertian bahwa penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif tidak selalu memastikan keberhasilan, penyesuaian yang diharapkan dari waktu ke waktu.
- b. Komunikasi dan partisipasi
Tujuan dan rencana yang telah dibuat dapat dikomunikasikan kepada pihak yang lain dalam organisasi. Setiap orang yang terlibat dalam proses perencanaan seharusnya tahu landasan apa yang mendasari strategi fungsional, dan bagaimana strategi-strategi tersebut diintegrasikan dan dikoordinasikan. Sumber daya yang bertanggung jawab untuk

mencapai tujuan dan mengimplementasikan rencana diberi kesempatan untuk mengembangkan strategi tersebut. Oleh karenanya pentingnya partisipasi dan keterlibatan setiap personil perencana berkomitmen pada rencana sebagai suatu kesatuan tugas yang menjadi tanggung jawab dalam proses perencanaan.

- c. Konsistensi /revisi /dan pembaruan
Adanya konsisten secara horizontal maupun secara vertikal, konsistensi horizotal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten diseluruh organisasi / dari satu departemen ke departemen lainnya.

Konsistensi vertikal berarti bahwa tujuan seharusnya konsisten dari atas hingga ke bawah organisasi: tujuan strategis, taktis, dan operasional harus selaras karena arena penetapan tujuan dan perencanaan merupakan proses yang dinamis, tujuan dan perencanaan juga harus direvisi dan diperbarui secara berkala.

- d. Adanya sistem penghargaan yang efektif
Penghargaan efektif bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan penghargaan atas diri personil karena dapat berhasil melaksanakan tugas sehingga dapat memberikan motivasi yang lebih tinggi untuk bekerja lebih maksimal dan berkualitas dalam membuat dan menganalisa bagaimana tujuan dan rencana kerja lebih maksimal, menghasilkan output yang tepat sasaran perencanaan.

Dengan demikian perencanaan dalam penelitian ini digambarkan sebagai

proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi dan memaksimalkan efektivitas seluruhnya dari suatu organisasi sebagai suatu sistem, sesuai dengan tujuan yang ingin di capai. Dari penelahaan tersebut maka perencanaan memiliki tiga karakteristik yakni:

- a. Perencanaan menyangkut masa yang akan datang
- b. Terdapat suatu elemen identifikasi pribadi atau organisasi, yaitu serangkaian tindakan di masa yang akan datang dan akan di ambil oleh perencana
- c. Masa yang akan datang, tindakan dan identifikasi pribadi, serta organisasi merupakan unsur yang amat penting dalam setiap perencanaan.

Perencanaan adalah proses dasar yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan cakupan pencapaiannya. Merencanakan berarti mengupayakan penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya untuk mencapai suatu perencanaan. perencanaan dalam pengertian ini menitikberatkan kepada usaha untuk menyeleksi dan menghubungkan sesuatu dengan kepentingan masa yang akan datang serta usaha untuk mencapainya.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Promosi dalam Menunjang Efektivitas Strategi Promosi Daerah berdasarkan Fungsi Pengorganisasian

Penempatan fungsi pengorganisasian setelah fungsi perencanaan merupakan hal yang logis karena tindakan pengorganisasian menjembatani kegiatan perencanaan dengan pelaksanaannya. Suatu rencana yang telah tersusun secara matang dan ditetapkan berdasarkan perhitungan-perhitungan tertentu, tentunya tidak dengan sendirinya mendekatkan

organisasi pada tujuan yang hendak dicapainya. Ia memerlukan pengaturan-pengaturan yang tidak saja menyangkut wadah dimana kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan, namun juga aturan main yang harus ditaati oleh setiap orang dalam organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi organisasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir merupakan wujud nyata peran serta Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana promosi melalui kebijakan dalam pemberian dukungan pemberian pelimpahan kewenangan Bupati selaku Kepala Daerah kepada SKPD untuk tugas pengelolaan perizinan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan dari aturan kelembagaan pelayanan. Dimana pelaksanaan dari aturan kelembagaan tersebut sampai saat ini dapat berjalan sesuai ketentuan. Namun pelaksanaan belum dapat dikatakan efektif karena data dan laporan tidak disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah tidak efektif.

Pencapaian target dan sasaran organisasi ditentukan oleh kemampuan kerja dari seluruh komponen yang terlibat di dalam organisasi terutama sumber daya manusia yang menjadi fokus utama tercapainya target dan sasaran tersebut. Banyak tugas-tugas yang diselenggarakan oleh suatu instansi tidak terorganisir dengan efektif.

Merujuk tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana dalam melaksanakan tugas tersebut menyelenggarakan fungsi diantaranya melakukan penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan

dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan segala permasalahan yang dihadapinya mengalami kesulitan dalam pelaksanaan tugas yang dimilikinya apabila tidak didukung dengan segala ketentuan dan aturan yang jelas maka pencapaian proses tujuan pencapaian tujuan tidak berjalan dengan tepat sesuai dengan prosedur yang ada.

Hal ini sesuai dengan pendapat Hani Handoko (2003: 110) yang menyatakan bahwa fungsi dan tujuan organisasi merangkum sebagai berikut:

- a. Pedoman bagi kegiatan, melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang. Tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarahan dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi. Dalam hal ini, fungsi tujuan memberikan arah dan pemusatan kegiatan organisasi mengenai apa yang "harus" dan "harus tidak" untuk dilakukan atau dikerjakan.
- b. Sumber legitimasi, tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran-pembenaran kegiatannya, disamping itu keberadaannya dikalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, karyawan, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Pengakuan atas legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.
- c. Standar pelaksanaan, bila tujuan dinyatakan secara jelas dan dipahami dimana hal ini dipahami akan memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi.

- d. Sumber motivasi, tujuan organisasi dapat berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi karyawan yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggotanya. Fenomena ini tampak paling jelas dalam organisasi yang menawarkan insentif bagi pencapaian tingkat kinerja tertentu, dan sebagainya, yang dikaitkan secara langsung sumber motivasi yang kuat.
- e. Dasar rasional pengorganisasian, dinyatakan secara sederhana, tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi seperti pola komunikasi, mekanisme pengawasan, departementasi, dan sebagainya.

Hal tersebut menyiratkan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sangat didukung diantaranya oleh sumber legitimasi, tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui pembenaran-pembenaran kegiatannya dalam penetapan kebijakan dan aturan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas organisasi yang difasilitasi dengan koordinasi.

Menurut Hani Handoko (2003: 195), koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa tanpa koordinasi, individu-individu dan departemen-departemen tidak dapat mencapai kinerja pelaksanaan tugasnya dengan efektif atau maksimal karena menyangkut dengan kewenangan dan tanggung jawab atas tugas dan fungsi yang

telah dibebankan sehingga tidak tercapainya tujuan organisasi secara keseluruhan.

Oleh karena itu dalam menghadapi hambatan dalam fungsi organisasi penting bagi suatu organisasi melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan, aturan sebagai pedoman tugas, standar pelaksanaan tugas dan legitimasi agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Promosi dalam Menunjang Efektivitas Strategi Promosi Daerah berdasarkan Fungsi Pelaksanaan

Pelaksanaan (*actuating*) pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang kompleks dan ruang lingkupnya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. Pelaksanaan (*actuating*) merupakan salah satu fungsi terpenting dalam manajemen. Pentingnya pelaksanaan (*actuating*) didasarkan pada alasan bahwa perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital yang harus diimplementasikan melalui aktivitas dalam suatu tindakan atau usaha yang menimbulkan tindakan. Pentingnya fungsi pelaksanaan (*actuating*) dalam manajemen karena berhubungan erat dengan aspek-aspek individual yang bergerak atau diatur dalam pembagian kerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pelaksanaan dalam organisasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir adalah mengarahkan dan menggerakkan sumberdaya organisasi dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang telah menjadi indikator kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dalam hal ini pelaksanaan strategi promosi daerah telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam kegiatan

Penyelenggaraan Pameran Investasi sesuai dengan anggaran yang telah disediakan dapat berjalan efektif dan sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan namun tidak maksimal karena tidak semua item pada penyelenggaraan pameran investasinya lainnya tidak dapat dilakukan karena adanya keterbatasan penganggaran.

Hal tersebut ditegaskan Wukir (2013: 33) yang memberikan pengarahannya sebagai penyatuan orang-orang dengan organisasi untuk memperoleh kerja sama mereka dalam mencapai tujuan. Hal ini juga berarti memberikan instruksi, membimbing, dan menginspirasi orang-orang dalam organisasi untuk mencapai tujuannya. Pelaksanaan (*actuating*) merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry (2010:62). *Actuating* juga dimaknai sebagai upaya untuk membuat semua anggota organisasi agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian yang telah ditetapkan.

Selanjutnya fungsi *actuating* merupakan bagian penting, dari proses manajemen berbeda dengan ketiga fungsi manajemen lainnya karena *actuating* berhubungan dengan pengelolaan orang-orang dalam organisasi yang pada dasarnya dapat menggerakkan fungsi-fungsi manajemen lainnya atau dengan kata lain berfungsi menggerakkan atau melaksanakan seluruh fungsi perencanaan, pengorganisasi dan pengendalian agar dapat bekerja sesuai sasaran yang telah ditetapkan dalam organisasi.

Oleh karenanya apabila terdapat hambatan dalam fungsi pelaksanaan ini maka dapat dilakukan cara-cara yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya dengan melihat:

Segi organisasi:

- a. Adanya aturan dan ketentuan yang jelas dalam melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mengatasi

kemungkinan adanya kepastian perkembangan organisasi baik ke dalam maupun ke luar.

- b. Tersedianya fasilitas - fasilitas pendukung diantaranya perangkat lunak atau perangkat keras yang diperlukan untuk gerak organisasi yang didasarkan atas pengkajian yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi aspek kuantitas dan kualitas.
- c. Sarana komunikasi yang memadai yakni segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan dan menerima informasi, misalnya telepon, internet, mimbar, publikasi, journal dan sebagainya sebagai bagian tugas pengorganisasian.
- d. Kepemimpinan dalam memberikan arahan tugas dan tanggung yang jelas kepada bawahan dalam melaksanakan fungsi dan tujuan organisasi.

Segi Pemimpin:

- a. Wewenang: Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memahami akan tugas dan wewenang yang diembannya
- b. Memiliki kemampuan konseptual, struktural dan teknis dalam mendukung pelaksanaan tugas organisasi
- c. Memiliki sifat kepemimpinan yang dapat membangkitkan motivasi bawahan dalam hal energi jasmani dan rohani (*physical and nerves energy*), semangat untuk mencapai tujuan (*a sence of purpose a direction*), ramah dan penuh perasaan (*friend lynes and effection*), integritas (*integrity*), mudah mengambil keputusan (*decisive ness*), cerdas (*intelligence*), kecakapan mengajar (*teaching skill*), keyakinan (*faith*), memahami teknik-teknik kepemimpinan.

Segi Pegawai:

- a. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai
- b. Memiliki pandangan bahwa pengabdian dan loyal terhadap organisasi merupakan kewajiban dan tanggung jawab pegawai

- c. Dapat bekerjasama dengan tim kerja

Dengan demikian maka fungsi penggerakan (*actuating*) dalam organisasi berhubungan dengan kegiatan yang bertujuan agar orang- orang yang terlibat dalam organisasi dapat bekerja sesuai dengan pembagian kerja yang sudah ditetapkan pada tahap pengorganisasian. Dimana fungsi *actuating* dapat pula diartikan sebagai tindakan memengaruhi dan menggerakkan orang orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama sama untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dari pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan *actuating* tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran.

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Promosi dalam Menunjang Efektivitas Strategi Promosi Daerah berdasarkan Fungsi Pengendalian

Setiap organisasi dapat mencapai tujuan organisasinya memerlukan manajemen. Di dalam memfungsikan manajemen diperlukan proses pengendalian atau pengawasan, atau kegiatan pencapaian tujuan organisasi melalui pengendalian atau pengawasan dapat dinamakan sebagai proses manajemen. Pengendalian atau pengawasan dilakukan agar organisasi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif dan efisien.

Dengan evaluasi dapat dijadikan informasi yang dapat menjamin bahwa aktivitas yang menyimpang tidak terjadi atau terulang kembali. Dengan kata lain pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Oleh karena itu,

pengawasan merupakan suatu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap pelaksana terutama yang memegang jabatan pimpinan. Tanpa pengawasan, pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan- penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman yang lalu.

Pengawasan atau pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara dengan baik. Uraian tersebut menggambarkan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengendalian dalam pengelolaan sarana dan prasarana pengaduan dilakukan melalui kotak pengaduan/ saran baik tertulis maupun tidak tertulis yang disiapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Indragiri Hilir yang akan ditindak lanjuti oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan sesuai dengan permasalahan terkait dengan investasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan promosi melalui progres kegiatan setiap bulannya yang akan dibahas pada pertemuan setiap bulannya oleh seluruh SKPD, serta membuat laporan kegiatan tahunan yang berisikan pengawasan, evaluasi, prestasi, dan kendala yang di temukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Marno & Trio Supriyanto (2008:38) yang menyatakan bahwa pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa aktivitas sebenarnya sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Proses pengawasan dapat melibatkan beberapa elemen-elemen yaitu:

- a. Menetapkan standar kinerja
- b. Mengukur kinerja
- c. Membandingkan unjuk kerja dengan standar yang telah ditetapkan
- d. Mengambil tindakan korektif saat terdeteksi penyimpangan.

Dengan demikian pengawasan dapat dilakukan melalui tahap-tahap yang telah ditentukan berdasarkan perencanaan yang telah disusun. Seorang manajer dapat melakukan fungsi pengawasan dengan baik, jika mengetahui secara jelas proses pengawasan tersebut secara jelas.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan dicapai, yaitu standar apa yang sedang dilakukan berupa; pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana memerlukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

Dengan demikian strategi promosi daerah pada Kabupaten Indragiri Hilir didasari dengan pemetaan masalah promosi daerah dengan membuat analisa manajemen melihat kekuatan potensi promosi daerah yang bisa dikembangkan di Kabupaten Indragiri Hilir, kelemahan yang ada dan melihat peluang yang baik dalam penganalisaan yang akurat dalam menetapkan strategi promosi daerah serta melihat ancaman yang menghambat pelaksanaan strategi promosi daerah yang akan dilaksanakan.

Daerah pemetaan masalah promosi daerah yang akan dibuat dapat menjadi solusi yang dapat dituangkan dalam rencana strategi jangka panjang yaitu Rencana Strategis (Renstra) melalui pengembangan daerah dengan memperbaiki *image* Kabupaten Indragiri Hilir sedangkan rencana strategi jangka pendek melalui Rencana Kerja (Renja) yaitu pengembangan daerah, pengembangan kemitraan dan rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Dengan demikian melalui Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dalam mempromosikan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan

sarana dan prasarana promosi yang tepat dan cepat dapat diakses oleh masyarakat atau calon investor menggunakan alat atau media promosi, seperti web site, aplikasi online, media cetak, media elektronik, media promosi dan memperkuat materi pameran yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk mengatasi hambatan dalam fungsi pengendalian dapat dilakukan:

- a. Adanya standar pelaksanaan yang menjadi ukuran sebagai standar penilaian hasil pelaksanaan berupa penetapan criteria-kriteria untuk mengukur pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bentuk kualitatif ataupun kuantitatif
- b. Adanya penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat melalui observasi, laporan (lisan dan tertulis, pengujian atau yang lainnya
- c. Adanya perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan. Perbandingan pelaksanaan yang real dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang ditetapkan.
- d. Adanya hasil analisa pengendalian dalam rangka apabila ada pengambilan tindakan koreksi.

Pengelolaan Proses Perencanaan Kegiatan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan anggaran pada setiap SKPD dapat dilaksanakan sesuai dengan mekanisme perencanaan dimulai dari RPJMD, RKPD, Renja-SKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD dan APBD yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hanya saja penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing kegiatan belum maksimal dan tidak proposional serta tidak melakukan analisis standar belanja.

Adapun dasar melakukan perubahan kegiatan perangkat daerah dapat dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan

situasi dan kondisi yang terjadi. Perkembangan situasi dan kondisi tersebut dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Jadi Perubahan APBD tidak berarti selalu tentang penambahan anggaran.

Dimana penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila:

1. Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
2. Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Ditemui keadaan yang menyebabkan *saldo anggaran lebih* tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Secara sederhana perubahan APBD dapat diartikan sebagai upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangannya dengan perkembangan yang terjadi. Perkembangan dimaksud bisa berimplikasi pada meningkatnya anggaran penerimaan maupun pengeluaran, atau sebaliknya. Namun, bisa juga untuk mengakomodasi pergeseran-pergeseran dalam satu SKPD. Perubahan atas setiap komponen APBD memiliki latar belakang dan alasan berbeda. Ada perbedaan alasan untuk perubahan anggaran pendapatan

dan perubahan anggaran belanja. Begitu juga untuk alasan perubahan atas anggaran pembiayaan, kecuali untuk penerimaan pembiayaan berupa SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu), yang memang menjadi salah satu alasan utama mengapa perubahan APBD dilakukan.

Upaya mengatasi hambatan perencanaan kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan dengan melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah, khususnya perencanaan APBD, masih merupakan agenda strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, yang merupakan inti dari kewajiban Daerah, DPRD, dan Kepala Daerah. Kegagalan dalam membuat perencanaan berarti merencanakan sebuah kegagalan. Kegagalan dalam perencanaan APBD sama dengan merencanakan kegagalan Daerah tersebut untuk mewujudkan kewajibannya, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayahnya.

Disamping itu, dalam penyusunan program dan kegiatan bahkan belanja disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak menggunakan analisis kewajaran belanja atau analisis standar belanja, masih terdapat penentuan besaran anggaran untuk setiap kegiatan tidak disesuaikan dengan kebutuhan belanja, biasanya belanja pegawai lebih besar dibanding belanja kegiatan. Untuk menjamin terlaksananya kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien maka diperlukan adanya pengelola keuangan yang memiliki kinerja yang baik khususnya dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang akurat dan tepat waktu.

SIMPULAN

Sebagaimana wawancara dengan informan / narasumber, maka dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir kurang efektif, hal ini dapat

dilihat dari : Sebagaimana wawancara dengan informan / narasumber, maka dapat disimpulkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir kurang efektif.

Perencanaan pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan sesuai aturan yang berlaku dan tahapan yang telah ditentukan melalui Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi. Dalam perencanaan tersebut, termuat tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, beserta strategi dan kebijakannya. Namun meskipun perencanaan sudah dilaksanakan dengan baik pada tingkat Perangkat Daerah pelaksana kegiatan promosi daerah (DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hilir), melalui penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan yang sesuai dengan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang tertuang dalam dokumen perencanaan, baik jangka pendek (RKA dan DPA) maupun jangka menengah (RPJMD), dalam rangka mendukung Rencana Strategi Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang telah ditetapkan, dengan menyusun dan mengusulkan kegiatan sebagai berikut :

- a. Terdapat hambatan, yaitu pengalokasian penganggaran tidak sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan. Sehingga perencanaan yang telah ditetapkan dalam bentuk DPA, tidak lagi mengkaper seluruh kegiatan yang ingin dilaksanakan. Dimana dalam hal ini, hanya Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi saja yang mendapat dukungan penganggaran. Kondisi demikian tentu saja mengurangi efektivitas strategi promosi daerah, karena tidak semua strategi yang telah ditetapkan dalam perencanaan dapat dilaksanakan.

Dengan demikian, fungsi perencanaan pada pengelolaan sarana dan prasarana promosi belum efektif dalam menunjang strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

b. Pengorganisasian dalam pengelolaan sarana dan prasarana promosi sebagai penunjang strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir telah termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja di Lingkungan Pemerintah Indragiri Hilir, dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Indragiri Hilir lah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati Indragiri Hilir selaku Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun salah satu fungsinya adalah merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pada Bidang Promosi Penanaman Modal. Fungsi tersebut memuat pengelolaan sarana dan prasarana promosi dalam menunjang efektivitas strategi promosi daerah yang telah ditentukan. Kepala DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, beserta 4 (empat) orang staf yang memiliki pembagian tugas pokok dan fungsi masing-masing secara jelas dalam melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana promosi tersebut.

Namun demikian, terdapat hambatan pada kualitas sumber daya manusia yang masih belum mumpuni dan minim pengetahuan maupun keterampilan untuk mengelola sarana dan prasarana promosi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, fungsi pengorganisasian pada pengelolaan sarana dan prasarana promosi belum efektif dalam menunjang strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

c. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana promosi sebagai penunjang strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir telah dilakukan sesuai dengan ketersediaan anggaran yang diberikan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi, dan tentunya sesuai dengan indikator sasaran yang telah ditetapkan. Namun ada hambatan yang disebabkan oleh kondisi alam daerah dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kreatifitas tinggi dalam mengelola sarana dan prasarana promosi daerah, sehingga promosi daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya masih bersifat monoton, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola informasi dan data terkait promosi daerah. Dengan demikian, fungsi pelaksanaan pada pengelolaan sarana dan prasarana promosi belum efektif dalam menunjang strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

d. Pengendalian dalam pengelolaan sarana dan prasarana promosi sebagai penunjang strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan melalui pelaporan progres kegiatan, serta membuat laporan kegiatan tahunan yang berisikan pengawasan, evaluasi, prestasi dan kendala yang

ditemukan dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun hambatan pengendalian adalah tidak diagendakannya dengan baik perumusan masalah penanaman modal dengan dinas terkait, tidak terealisasinya pemutakhiran data potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, kurangnya kemampuan pelaksana membuat analisa prioritas kegiatan, kurangnya dukungan anggaran, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni, serta koordinasi yang belum optimal antar satker terkait. Dengan demikian, fungsi pengendalian pada pengelolaan sarana dan prasarana promosi belum efektif dalam menunjang strategi promosi daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Pembaruan. Yogyakarta.
- Akdon. 2011. *Strategic Management for Educational Management* (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan). Alfabeta. Bandung
- Andri Feriyanto dan Endang Shytha Triana. 2015. *Pengantar Manajemen, Mediatara*, Kebumen.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Erni TrisKurniawan, Sule dan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*. Prenada Media. Jakarta.
- Harbani Pasolong. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Hasan Alwi. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ilmar A. 2004. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media. Jakarta.
- Ismail Nawawi Uha. 2012. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*, VIV Press, Jakarta.
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit*. Grasindo. Jakarta.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Jilid 1, PT. Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah (Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang)*. Erlangga. Jakarta.
- Nafarin, M. 2013. *Penganggaran Perusahaan*. Edisi ketiga, Cetakan kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- N. Rosyidah Rakhmawati. 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bayu Media Publishing. Malang.
- Pheni Chalid. 2005. *Keuangan Daerah, Investasi, dan Desentralisasi Tantangan dan Hambatan*, Mitra, Jakarta.
- Rivai Veithzal, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktik*, Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Robbins, Stephen P, Coulter, Mary. 2012. *Manajemen*. PT Indeks. Jakarta.
- Safroni, Ladzi. 2012. *Manajemen dan Reformasi Pelayanan Publik dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Aditya Media Publishing. Surabaya.
- Said. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah*. Gramedia. Jakarta.
- Soekidjan. 200. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sopiah. 2008. *Perilaku Organisasi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta. Bandung.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen, CV*. Mandar Maju. Bandung.
- Terry, George R. 2006. *Prinsip -Prinsip Manajemen*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Wukir. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi Sekolah*. Cetakan I, Multi Presindo. Yogyakarta.